



Judul : Dicecar DPR soal kesepakatan dengan China, Menlu: Kedaulatan RI tidak bergeser
Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1&7

Dicecar DPR Soal Kesepakatan Dengan China **Menlu: Kedaulatan RI Tidak Bergeser!**

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendapat “hujan” pertanyaan saat rapat dengan Komisi I DPR, Senin (2/12/2024) pagi. Salah satunya, Menlu dicecar DPR soal kesepakatan Pemerintah dengan China yang dibuat saat lawatan Presiden Prabowo Subianto, 9 November lalu. Di hadapan para wakil rakyat, Menlu tegaskan “kedaulatan RI tidak bergeser”.

Menlu Sugiono memenuhi undangan Komisi I DPR untuk menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Rapat perdana antara Menlu Sugiono dengan Komisi I ini berlangsung pukul 10.00 WIB. Dipimpin Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.

“Agenda kita yakni membahas tentang rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan Presiden,” kata Utut Adianto, saat membuka rapat.

Setelah itu, Wakil Ketua Komisi I Budisatrio Djiwandono meminta izin kepada Utut agar memerintahkan jajarannya untuk memperkenalkan diri di hadapan birokrat Kemenlu.



VERSI
DIGITAL
ARTIKEL INI,
SILAKAN
SCAN QR
CODE

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

Menlu: Indonesia Menghormati Hukum Internasional Dan UNCLOS

Menlu: Kedaulatan RI

... DARI HALAMAN 1

“Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” pinta Budisatrio.

Menlu Sugiono pun ikut memperkenalkan jajarannya yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Wamenlu Anis Matta. Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

Usai saling memperkenalkan diri, raker kemudian masuk pada hal substantif. Terutama yang menyangkut pada posisi Indonesia di hadapan China. Mengingat, beberapa waktu lalu Indonesia dan China menyepakati 14 poin pernyataan bersama, yang satu di antaranya terdapat

klausul batas Laut China Selatan (LCS).

Hal ini menuai sorotan Komisi DPR yang membidangi luar negeri. Mereka mencesar maksud pernyataan bersama tentang klausul batas LCS. Karena informasi yang berkembang, dalam kesepakatan itu, Indonesia mengakui *Nine Dash Line* (sembilan garis putus-putus), istilah yang biasa dipakai China untuk mengklaim kepemilikan Perairan Natuna.

Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China. Padahal, Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. “Pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan,” kata anggota DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini.

Anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanudin juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia mengingatkan, sikap Indonesia itu saklek menolak sembilan garis putus-putus. Indonesia, tegas dia, meng-

hormati hukum internasional.

“Apakah betul kita akan bekerjasama (di wilayah) *Nine Dash Line* yang dulu kita tolak itu. Jangan membuat seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” tegas TB Hasan.

Protes juga dilayangkan Anggota DPR Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Natikusumah. Dia mengaku heran dengan kesepakatan yang dibuat ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden China Xi Jinping tersebut. Rizki lantas menyoroti *code of conduct* (CoC) yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal *code of conduct*, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS. Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (CoC)

berdasarkan konsensus. Sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

“Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan?” tanya Rizki.

Dicecar banyak protes, Menlu Sugiono tetap santai. Dengan perlahan, dia menjawab mengenai posisi Indonesia dalam menyikapi gaung *Nine Dash Line* China. “Di situ (pernyataan bersama) tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerjasama di titik a koordinat b,” tandas Menteri Sugi.

Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS. Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan. ■ UMM